

PENYULUHAN INFORMASI DARI BAGIAN KEJAHATAN BERAT

TUNTUTAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN UNTUK MANTAN MENTERI PERTAHANAN INDONESIA, KOMANDAN MILITER TERTINGGI INDONESIA DAN GUBERNUR TIMOR LESTE

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999 mendirikan Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste [UNTAET] dengan tanggung jawab sepenuhnya atas administrasi Timor Leste, menggunakan semua otoritas legislatif dan eksekutif, termasuk administrasi keadilan. Resolusi 1272 mengutuk semua kekerasan dan tindakan yang mendukung kekerasan di Timor Leste dan menuntut bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut diadili.

Di dalam Laporan Sekretaris Umum terhadap Dewan Keamanan tanggal 17 April 2002, Sekretaris Umum mengatakan, antara lain, bahwa Bagian Kejahatan Berat di United Nations Mission of Support in East Timor (UNMISSET) akan menitikberatkan penyelidikan terhadap mereka yang telah mengatur, memerintahkan, menghasut atau membantu dengan cara lain dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kejahatan tersebut.

Dalam suatu usaha untuk memenuhi mandat tersebut, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat telah mengajukan sebuah surat dakwaan penting pada tanggal 24 Pebruari 2003 ke Panel Khusus untuk orang-orang yang dituntut dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di wilayah Timor Leste pada tahun 1999. Pangkat dan jabatan yang telah diuraikan dibawah adalah yang diduduki mulai bulan April sampai September tahun 1999:

Jenderal WIRANTO

(Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia)

Mayor Jenderal Zacky Anwar MAKARIM

(Ketua Tim Khusus/Satgas AJU)

Mayor Jenderal Kiki SYAHNAKRI

(Panglima Komando Operasi Penguasa Darurat Militer di Timor Leste)

- **Mayor Jenderal Adam Rachmat DAMIRI**

(Komandan Komando Daerah Militer IX/Udayana – meliputi Timor Leste)

Kolonel Suhartono SURATMAN

(Komandan Komando Resort Militer 164 di Timor Leste sampai tanggal 13 Agustus 1999)

Kolonel Mohammad Noer MUIS

(Komandan Komando Resort Militer 164 – di Timor Leste mulai tanggal 13 Agustus 1999)

Letnan Kolonel Yayat SUDRAJAT

(Komandan Kesatuan Tugas Tribuana VIII; Komandan Kesatuan Tugas Intelijen, Komando Resort Militer 164, Timor Leste)

- **Gubernur Abilio Jose Osorio SOARES**

(Gubernur Timor Leste)

Para terdakwa telah dituntut dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan atas Pembunuhan, Deportasi dan Persekusi yang dilakukan para terdakwa sebagai bagian dari sebuah serangan yang luas atau sistimatis diarahkan terhadap rakyat Timor Leste dan secara khusus menargetkan mereka yang dianggap pendukung kemerdekaan untuk Timor Leste.

Sebagai bagian dari sebuah serangan yang luas atau sistimatis, Mayor Jenderal MAKARIM, SYAHNAKRI, DAMIRI, Kolonel SURATMAN, Letnan Kolonel SUDRAJAT dan Gubernur SOARES secara khusus dituntut dengan keikutsertaannya dalam pendirian kelompok-kelompok milisi yang keras. 6 terdakwa dituduh bekerjasama dalam sebuah kebijakan untuk mendanai, mempersenjatai, melatih dan mengarahkan para milisi. Surat dakwaan menuduh bahwa uang yang digunakan untuk mendukung kelompok-kelompok milisi diambil dari dana Pemerintahan Pusat. Kelompok-kelompok milisi bekerjasama dengan TNI dalam sebuah kampanye yang terencana dan sistimatis yang mengakibatkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan di seluruh Timor Leste selama periode tahun 1999.

Surat dakwaan menuduh bahwa 7 terdakwa komandan militer Indonesia, dalam jabatan otoritas kepemimpinannya, bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian para bawahannya di militer Indonesia oleh karena kegagalan mereka untuk mengambil tindakan yang layak untuk mencegah kejahatan tersebut atau menghukum pelakunya. Lebih lanjut dituntut lagi bahwa oleh karena sifat hubungan yang terdapat diantara militer Indonesia dan milisi, para komandan militer Indonesia yang didakwa mempunyai pengendalian yang efektif terhadap para kelompok milisi yang beroperasi di Timor Leste dan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh para milisi.

Para terdakwa dituntut atas persekusi dan pembunuhan terhadap rakyat yang dianggap mendukung kemerdekaan untuk Timor leste. Persekusi tersebut meliputi pembunuhan, penyiksaan, serangan fisik, pengurungan sewenang-wenang, intimidasi, pembakaran dan pengrusakan terhadap harta milik.

Surat dakwaan ini mencatat lebih dari 280 pembunuhan berdasarkan lebih dari 1500 pernyataan saksi dan laporan. Surat dakwaan ini termasuk 10 serangan besar sebagai tambahan terhadap lebih dari 40 insiden pembunuhan lainnya yang terjadi sebelum dan setelah jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999. Termasuk serangan-serangan sebagai berikut: -

Di **serangan Gereja Liquica**, dituduh bahwa para prajurit TNI, pasukan polisi Brimob dan milisi mengepung gereja dimana rakyat sedang mengungsi. Pada sore hari tanggal **6 April 1999**, brigade mobile polisi menembak ke arah gereja dan milisi menyerang rakyat yang berada di dalam. Ketika para pengungsi berusaha melarikan diri dari halaman, para prajurit TNI dan milisi menembak ke dalam banyak orang dengan demikian membunuh laki-laki, perempuan dan

anak-anak.

Pada tanggal **12 April 1999** di **Cailaco-Kabupaten Bobonaro**, dituduh bahwa para prajurit TNI dan milisi membunuh 7 orang pada dua insiden yang berbeda. Pada insiden pertama, para prajurit TNI di depan seorang perwira TNI dituduh membunuh 3 penduduk desa. Pada insiden kedua, 4 orang ditembak satu per satu di belakang sebuah pos Inteligen Militer Indonesia oleh sekelompok prajurit TNI dan milisi di depan para pemimpin TNI. Selama hari-hari berikut, dituduh bahwa TNI dan milisi bertanggung jawab atas paling sedikit pembunuhan terhadap 6 penduduk sipil lagi yang diduga sebagai pendukung kemerdekaan di kecamatan Cailaco.

Dituduh bahwa pada tanggal **17 April 1999**, **Apel Raksasa Dili** diatur oleh para pemimpin milisi dari Pasukan Pejuang Integrasi [PPI]. Hadir pada apel raksasa tersebut adalah Mayor Jenderal SYAHNAKRI, Kolonel SURATMAN, Gubernur SOARES dan anggota milis dari seluruh Timor Leste di depan gedung utama pemerintah di Dili. Ketika apel raksasa tersebut, Wakil Panglima PPI, Eurico Guterres, berbicara kepada perkumpulan dan memerintahkan semua milisi mulai hari itu untuk 'mencari dan menangkap' pendukung kemerdekaan dan menyeret mereka ke sebuah 'pengadilan internasional' dengan mengatakan kalau mereka melawan 'menembak'. Ketika pidato tersebut, Guterres mengidentifikasi keluarga Carrascalao sebagai penghianat terhadap integrasi. Setelah apel raksasa, para prajurit TNI dan anggota milisi menyerang berbagai kampung di Dili dan menargetkan rakyat yang dianggap pendukung kemerdekaan. Pada salah satu serangan terhadap rumah Manuel Carrascalao, para prajurit TNI dan milisi membunuh 12 orang termasuk anak laki-laki Carrascalao.

Serangan di **Dioses Dili** terjadi pada tanggal **5 September 1999**. Dituduh bahwa para prajurit TNI dan milisi menyerang Dioses dan rakyat yang mungungsi didalamnya, dengan mengakibatkan kematian paling sedikit 11 penduduk sipil.

Di antara bulan Januari 1999 dan September 1999, **Gereja Suai** merupakan tempat pengungsian para penduduk desa kabupaten Cova Lima yang mungungsi dari kekerasan yang luas dari TNI dan milisi. Dituduh bahwa pada tanggal **6 September 1999**, para prajurit TNI, polisi dan milisi menyerang rakyat yang tidak bersenjata di dalam halaman Gereja. Bupati Cova Lima hadir ketika serangan dan mengenakan seragam TNI dan disenjatai dengan senjata api laras panjang. Selama serangan terhadap gereja, para prajurit TNI dan milisi menembak ke dalam kumpulan banyak orang dengan demikian membunuh laki-laki, perempuan dan anak-anak. 3 Pastor di gereja juga dibunuh ketika serangan. Mayat 30 korban kemudian dikembalikan dari Timor Barat.

Pada awal bulan September 1999, dituduh bahwa para prajurit TNI dan milisi memulai sebuah kampanye untuk memaksa rakyat di dan disekitar Maliana untuk meninggalkan rumah-rumahnya. Para pendukung kemerdekaan disuruh pergi ke **Polres Maliana**. Pada tanggal **8 September 1999**, seorang perwira TNI mengidentifikasi beberapa pendukung kemerdekaan yang telah mungungsi ke Polres dan memerintahkan para prajurit TNI dan milisi untuk membunuhnya. Dalam serangan selanjutnya terhadap Polres paling sedikit 13 pendukung kemerdekaan dibunuh. Pada hari berikut, sebuah kelompok yang dipimpin oleh TNI mencari dan membunuh 13 pendukung kemerdekaan lain yang telah melarikan diri dari Polres.

Pembunuhan Passabe dan Makelab terjadi di Kabupaten Oecussi. Dituduh bahwa pada tanggal **8 September 1999**, para prajurit TNI dan milisi menyerang tiga desa di kecamatan Passabe mengakibatkan pengrusakan terhadap desa tersebut dan pembunuhan terhadap 18 orang. Pada tanggal **10 September 1999**, para prajurit TNI dan milisi menembak dan mencengam sampai mati 47 pemuda yang telah mereka memilih diantara para penduduk desa lain.

Pembunuhan Makelab terjadi pada tanggal **20 Oktober 1999**. Dituduh bahwa para prajurit TNI dan milisi menangkap rakyat yang bersembunyi di gunung-gunung Betunes. Rakyat tersebut dibawa secara paksa ke tempat pasar di Makelab dimana mereka ditahan oleh para prajurit TNI dan milisi. 6 orang sipil yang kemudian diidentifikasi sebagai pendukung kemerdekaan oleh milisi ditembak sehingga mati. Kemudian pada hari itu seorang pendukung kemerdekaan ditemukan sedang bersembunyi di gunung Betunes oleh milisi dan kemudian ditembak dan ditikam sehingga mati.

Batalyon TNI 745 bermarkas di Kabupaten Lautem selama tahun 1999. Setelah pengumuman hasil jajak pendapat, dituduh bahwa Batalyon 745 melakukan sebuah kampanye kekerasan terhadap rakyat Kabupaten Lautem. Para prajurit Batalyon menargetkan orang yang dianggap pendukung kemerdekaan dengan demikian mengakibatkan pengrusakan terhadap harta mili, serangan terhadap individu dan dalam beberapa kasus, penyiksaan dan pembunuhan. Diantara tanggal **8 September** dan **21 September 1999**, para prajurit dari Batalyon tersebut membunuh 21 orang rakyat dengan pembunuhan terakhir terhadap wartawan Belanda, Sander Thoenes di Dili.

Di Kabupaten Lautem, milisi **Tim Alfa** telah didirikan pada tahun 1980an tetapi dikuatkan pada awal tahun 1999 oleh para prajurit TNI dan administrasi sipil untuk melawan pendukung kemerdekaan di Kabupaten Lautem. Pada tanggal **25 September 1999**, dituduh bahwa milisi Tim Alfa membunuh 3 pastor, 2 biarawati dan 4 orang lain ketidak menghadang jalan. Para anggota milisi menghentikan kendaraan yang ditumpangi orang-orang tersebut di sebuah penghadang jalan dan menembak dengan menggunakan senjata api SKS. Kendaraannya kemudian didorong ke dalam sebuah sungai dan sebuah granat tangan dilempar masuk untuk memastikan tidak ada yang selamat.

Surat dakwaan ini juga menuntut para terdakwa dengan tanggung jawab atas pemindahan paksa terhadap rakyat dari berbagai kabupaten di Timor Leste ke Timor Barat. Setelah pengumuman hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999 sekitar 200,000 orang dipaksa dari rumah mereka oleh TNI dan milisi dan dipindahkan ke Timor Barat.

Semua terdakwa dipercaya berada di Republik Indonesia. Surat perintah penangkapan telah dimintai dari Pengadilan Distrik Dili yang akan dikirim ke Jaksa Agung Republik Indonesia. Surat perintah penangkapan juga akan dikirim ke Interpol karena Timor Leste telah menjadi anggota Interpol pada tahun 2002.

PROFIL PARA TERDAKWA:

WIRANTO berpangkat sebagai Jenderal dan adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia [*Menhankam*] dan Panglima Tentara Nasional Indonesia [*Angkatan Bersenjata Republik Indonesia* dan mulai tanggal 1 April, 1999 *Tentara Nasional Indonesia*]. Pada tanggal 5 Nopember, 1999 **WIRANTO** berhenti sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dan diangkat sebagai Menteri Koordinasi Bidang Politik dan keamanan [*Menko Polkam*] mulai tanggal 5 Mei, 1999 sampai tanggal 17 Mei, 2000. Dia sekarang telah pensiunan dari Tentara Nasional Indonesia

ZACKY ANWAR MAKARIM berpangkat sebagai Mayor Jenderal. Pada tahun 1999 dia menduduki berbagai jabatan dan merupakan anggota berbagai tim khusus. Pada bulan Januari 1999 dia adalah Perwira Tinggi Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia [*Pati Mabes ABR*]. Mulai bulan Mei 1999 sampai bulan September 1999 dia adalah seorang anggota Tim Pengamanan Pensuksesan Penentuan Pendapat Otonomi Khusus Timor Timur [TP4 OKTT]. Mulai bulan Juli 1999 dia adalah Ketua Tim Khusus/Satgas AJU. Di satu atau lebih dari jabatan tersebut, **MAKARIM** bertugas sebagai Perwira Penghubung diantara Tentara Nasional Indonesia dan UNAMET. Setelah jajak pendapat di Timor Leste **MAKARIM** bertugas sebagai Perwira Tinggi di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

KIKI SYAHNAKRI berpangkat sebagai Mayor Jenderal dan bertugas sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat [*KSAD*] mulai dari bulan Mei 1998 sampai bulan Nopember 1999. Dia juga bertugas sebagai Panglima, Komando Operasi Penguasa Darurat Militer di Timor Leste pada bulan September 1999. **SYAHNAKRI** bertugas sebagai Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana [*Pangdam IX/Udayana*], meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Barat dan Timor Leste, mulai bulan Desember 1999 sampai bulan Nopember 2000 dan kemudian bertugas sebagai Wakil Ketua Staf Angkatan Darat [*Wakil KSAD*] mulai bulan Nopember 2000 sampai bulan Mei 2002. Dia sekarang pensiunan dari Tentara Nasional Indonesia.

ADAM RACHMAT DAMIRI berpangkat sebagai Mayor Jenderal dan bertugas sebagai Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana [*Pangdam IX/Udayana*], meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Barat dan Timor Leste, mulai bulan Juni 1998 sampai bulan Nopember 1999. Pada bulan Nopember 1999 **DAMIRI** diangkat sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Umum TNI.

SUHARTONO SURATMAN berpangkat sebagai Kolonel dan di antara bulan Juni 1998 dan tanggal 13 Agustus, 1999 adalah Komandan Komando Resort Militer 164/Wira Dharma [*Korem 164/Wira Dharma*], Timor Leste. Pada bulan Agustus 1999 **SURATMAN** ditugaskan sebagai Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI dan pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal.

MOHAMMAD NOER MUIS berpangkat sebagai Kolonel dan bertugas sebagai Komandan Komando Resort Militer 164/Wira Dharma [*Korem 164/Wira Dharma*], Timor Leste mulai tanggal 13 Agustus, 1999 sampai tanggal 3 Maret, 2000. Pada bulan Juni 2001 **MUIS** ditugaskan sebagai Wakil Gubernur Akademi Militer dan pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal.

YAYAT SUDRAJAT berpangkat sebagai Letnan Kolonel. Pada tahun 1999 dia menduduki berbagai jabatan. Dia adalah Komandan Satuan Tugas Tribuana VIII dan Komandan Satuan Tugas Inteligen, Komando Resort Militer 164/Wira Dharma [*Dan Satgas Intelijen, Korem 164/Wira Dharma*], Timor Leste. Satuan Tugas Tribuana VIII adalah nama operasi untuk sebuah kesatuan personil Komando Pasukan Khusus yang ditugaskan di Timor Leste. Personil Tribuana VIII ditugaskan ke Satuan Tugas Inteligen .

ABILIO JOSE OSORIO SOARES adalah Gubernur Timor Leste.

25 Pebruari 2003